

Implementasi Kebijakan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Sebagai Langkah Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pariaman

Ulya Fitri¹, Reza Novandri²

¹IAIN Batusangkar

ulyafitri@iainbatusangkar.ac.id

²Pemerintah Kota Pariaman

rezanovandri@rocketmail.com

Abstrak

Artikel ini menjelaskan mengenai bagaimana implementasi dan pencapaian kinerja kebijakan program satu keluarga satu sarjana (Saga Saja) di kota Pariaman. Adapun yang menjadi latar belakang Penelitian adalah untuk melihat bagaimana kebijakan yang baik dan dilatarbelakangi upaya peningkatan SDM Kota Pariaman sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan ini diimplementasikan? Ini penting dievaluasi sebagai bentuk pengawasan dari akademisi dan stakeholder, serta sebagai upaya peningkatan kebermanfaatan program bagi masyarakat kota pariaman. Penelitian ini menggunakan Metode atau pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan) langsung dilapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara Purposive, dengan melihat kesesuaian antara calon informan dengan informasi yang dibutuhkan. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum telah berjalan dengan baik dalam indikator Komunikasi, Disposisi dan Attitude, serta Struktur Birokrasi. Hanya saja masih ditemukan beberapa kelemahan pada Sumber Daya, dimana ketersediaan staf dalam implementasi dinilai kurang, serta kewenangan yang belum jelas pada setiap pos tanggung jawabnya, sehingga disarankan melakukan revisi dalam peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan. Juga sumber daya dana perlu dicarikan opsi sumber lain untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat program.

Kata kunci: Kebijakan; Pendidikan; Pemerintahan;

Abstract

This article describes how to implement and achieve the policy performance of the one family one bachelor program (Saga Only) in the city of Pariaman. The background of the research is to see how good policies and the background of efforts to increase human resources in the City of Pariaman as well as poverty alleviation efforts are implemented? This is important to be evaluated as a form of supervision from academics and stakeholders, as well as an effort to increase the benefit of the program for the people of Pariaman City. This research uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques were carried out by direct field observation, in-depth interviews, and documentation. Determination of informants is done purposively, by looking at the suitability of the prospective informants with the required information. Data were analyzed by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study

indicate that in general it has been running well in indicators of Communication, Disposition and Attitude, and Bureaucratic Structure. It's just that there are still some weaknesses in the Resources, where the availability of staff in implementation is considered lacking, and the authority is not yet clear in each post of responsibility, so it is recommended to make revisions in the regulations that are the basis for implementing the policy. It is also necessary to find other sources of funding options to increase the number of program beneficiaries.

Keywords: Policy, Education, Government

1. Pendahuluan

Pendidikan selalu menjadi metode terbaik dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sebagaimana peningkatan kualitas SDM selalu mejadi metode terbaik dalam membangun kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan suatu daerah. Saat ini 12 tahun masa Pendidikan sudah mendapat fasilitas dari pemerintah, namun belum untuk 4 tahun masa kuliah, sehingga akses ke perguruan tinggi oleh pemuda tamat sekolah menengah atas sederajat masih menjadi angan yang belum terwujud, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Pariaman (2022) Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, terindikasi melalui peningkatan angka rata – rata lama sekolah Kota Pariaman pada tahun 2018 sebesar 10,10, tahun 2019 menjadi 10,30, tahun 2020 menjadi 10,59 dan 10,67 pada tahun 2021. Pariaman. Ditambah lagi dengan kondisi pandemic covid 19 yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun negara(Suryaningsih Aseh, 2021).

Pemerintah sudah melakukan beberapa usaha untuk meminimalkan angka tersebut, salah satunya dengan meluncurkan program “Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA). Program ini merupakan bagian dari visi kepala daerah dan dituangkan dalam RPJMD Kota Pariaman. Untuk memastikan solusi maka perlu dibuat pertanyaan penelitian tentang hal ini, yaitu: Bagaimana Kebijakan program SAGA SAJA ini

menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Pariaman?.

Berjalannya program Saga Saja cukup disambut baik masyarakat Kota Pariaman, meskipun masyarakat memiliki harapan yang lebih besar dari sisi jumlah porsi bantuan, karena persyaratan yang ditetapkan tidak semua masyarakat yang memiliki, begitu juga dengan pemilihan kampus tujuan yang dianggap belum memiliki prestise yang tinggi dimata masyarakat, serta sekelumit dinamika dalam implementasi yang perlu dievaluasi.

2. Kajian Literatur

2.1 Evaluasi Kebijakan

Kajian Evaluasi Kebijakan dinilai sebagai alat riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Menurut lester dan stewart evaluasi dilakukan untuk melihat bagian kegagalan dalam implementasinya, serta untuk melihat hasil kebijakan yang sesuai dengan harapan yang diinginkan (Agustino, 2016).

William (Dunn, 1998) menyebutkan ada 3 pendekatan dalam evaluasi kebijakan yaitu evaluasi kebijakan semu, formal dan teoritis. Evaluasi semu bertujuan mendapatkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan tanpa menanyakan manfaat kebijakan pada individu, kelompok atau masyarakat. Evaluasi Formal bertujuan untuk

mendapatkan informasi berdasarkan sasaran program yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Evaluasi Teoritis bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan stakeholder sesuai target yang mereka inginkan. Dalam hal ini peneliti hendak mencoba mengakomodir ketiga pendekatan ini dalam penelitian ini.

2.2 Program Satu Keluarga Satu Sarjana

Penelitian tentang program ini telah dilakukan sebelumnya oleh Nofiardi Syarif dkk, dengan fokus kajian tentang strategi komunikasi Pemerintah Kota Pariaman pada program Satu Keluarga Satu Sarjana. Hasil penelitian menemukan bahwa program ini disosialisasikan langsung dengan metode dialog dan wawancara yang dilakukan oleh bagian humas dari Pemerintah Kota Pariaman dan tim koordinator program berupa stand atau meja informasi program yang siap melayani. Selain itu juga dilakukan sosialisasi dan komunikasi dengan media luar ruangan, website pemerintah, portal online, serta media sosial yang dikelola pemerintah. Ditemukan juga dalam penelitian ini hambatan berupa informasi yang kurang merata pada masyarakat yang berhak, kurangnya SDM yang mampu membangun jembatan komunikasi efektif selama program berjalan, serta ada juga beberapa tanggapan negative masyarakat tentang program (Syarif et al., 2021),

Di Jawa Timur juga dilakukan penelitian terkait program Saga Saja oleh Irsalina dkk, dengan fokus kajian pendistribusian dana oleh BAZNAS Jawa Timur, yaitu dengan metode transfer kepada mustahik penerima manfaat program Saga Saja yang berada diluar kabupaten, namun bagi penerima yang masih dalam kabupaten diutamakan penyerahan secara langsung (Almashuri & Subandi, 2021).

Di Bali, program yang sama diteliti pada ranah efektifitas program dalam meningkatkan prestasi akademik di STAI Denpasar Bali. Peneliti Azizaturrahi menemukan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan prestasi, karena sudah

sesuai dengan semua tahapan mulai dari pemahaman program, tepat waktu, tepat sasaran, tercapainya tujuan, serta perubahan nyata yang dialami mahasiswa penerima manfaat program, rata-rata nilai mahasiswa naik, meskipun beberapa ada yang turun namun, mahasiswa tetap berusaha lebih giat dalam belajar, dengan mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu disertai manajemen waktu yang baik dan berdoa. Hambatan mahasiswa yaitu kendala rasa malas, minimnya finansial, sehingga sebagian ada yang bekerja sambil, sehingga perhatiannya terbagi antara bekerja dan belajar (Adniyah et al., 2021).

Nada Khairiyah di Kabupaten Kampar juga tidak jauh berbeda, ia meneliti efektifitas pelaksanaan program dengan temuan beberapa penghambat keefektifan program, yaitu konsistensi program karena kurangnya kesadaran zakat, sehingga dana kurang sementara minat masyarakat sangat tinggi mengikuti program, akibatnya program terhenti karena minim anggaran (Khairiyah & Zulkarnaini, 2021).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini digolongkan ke dalam kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijaring dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu, peneliti juga ingin mencoba mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai deskripsi, gambaran faktual, dan akurasi tentang fakta - fakta dari program Pelatihan tenaga kerja yang dilaksanakan pemerintah kota Pariaman.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data diolah dan dianalisis dengan metode reduktif, yaitu informasi yang didapat disaring dan dipilih untuk di tampilkan dalam struktur yang bisa dipahami dengan alur yang jelas. Informan

adalah orang yang paling terkait dengan program (purposive), mulai dari pembuat program, penerima manfaat program dan pihak implementor di lapangan.

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan menurut Edward III memiliki 4 variabel penting, yaitu komunikasi, Sumberdaya, Kecendrungan tingkah laku dan sikap, dan struktur birokrasi (Winarno, 2007).

Mengutip Edward, Yuliah (2020) menyatakan dalam **komunikasi** terdapat 3 unsur penting, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi melihat bagaimana sebuah kebijakan yang sudah dirumuskan dapat disampaikan dan tersosialisasi dengan baik, untuk kemudian dilaksanakan dengan minim hambatan, serta memastikan tingkat kephahaman implementor terhadap syarat prasyarat kebijakan sudah tercapai.

Kejelasan terhadap seluruh struktur kebijakan akan sangat penting dalam memastikan kelancaran komunikasi antara perumus, implementor dan penerima manfaat kebijakan. Segala macam bias dan usaha dalam mengaburkan informasi oleh pihak tertentu harus diminimalisir. Hal ini bertujuan menciptakan alur komunikasi yang konsisten dan tidak berubah ubah sehingga menimbulkan kebingungan implementor serta penerima manfaat kebijakan. Unsur kepentingan yang dapat mengganggu konsistensi kejelasan transmisi informasi kebijakan harus dihilangkan.

Sumber Daya merupakan komponen utama keberhasilan sebuah kebijakan, ia meliputi ketersediaan staf, informasi fasilitas, wewenang. Keberadaan Staf sebagai sumber daya manusia (SDM) pelaksana kebijakan harus dipastikan jumlah mereka cukup berdasarkan hitungan kelancaran operasionalisasi kebijakan. Selain kapasitas staf harus dipastikan sebagai pihak yang paling memahami dasar, proses, tujuan, informasi, kewenangan dan fasilitas (Nugroho, 2017).

Informasi juga merupakan sumberdaya dalam sebuah kebijakan publik, informasi yang utuh mengenai kebijakan dan bagaimana kebijakan itu seharusnya dijalankan harus betul-betul tertulis rapi dan jelas serta tersampaikan kepada pelaksana, sebagai petunjuk teknis operasional bagi implementor. Selanjutnya ketersediaan data tentang penerima manfaat kebijakan dari beragam aspek karakter sosial kultural, sehingga data mengenai objek beserta level pemahaman mereka harus sudah terbaca semenjak awal perumusan.

Ketersediaan porsi wewenang yang jelas dan memadai harus dimiliki sebagai nilai sumberdaya kebijakan, karena efektifitas implementasi sangat bergantung kepada kewenangan yang diberikan kepada setiap lapisan implementor. Sebagaimana fasilitas juga mesti ditetapkan baik fisik maupun nonfisik, sehingga ketersediaannya menjamin kelancaran.

Kecendrungan tingkah laku dan sikap implementor (disposisi dan attitude), menjadi sebuah kondisi yang harus dipahami secara *comprehensive*. mengenal tingkat kecerdasan mereka saja belum cukup, harus disertai memastikan kesediaan dan komitmen yang tinggi untuk menjalankan kebijakan. Ini sangat penting untuk membangun kepedulian tinggi implementor, karena tidak sedikit kebijakan yang masuk ke zona “ketidakacuhan” oleh pelaksana maupun penerima manfaat. Oleh sebab itu hal-hal yang mampu memberi semangat dan informasi kebermanfaatn kebijakan harus mampu meningkatkan kecendrungan positif implementor untuk kemudian membangun komitmen tinggi sendiri dalam implementasi.

Selanjutnya **Struktur Birokrasi** harus tertata rapi efektif dan berjalan sesuai porsi kewenangan dan dilengkapi dengan petunjuk operasional yang jelas pada masing-masing lapisannya. Ini penting untuk menjamin kecepatan proses pelayanan, ketepatan pemberian keputusan dan kebesaran manfaat yang bisa diterima.

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (Saga Saja) merupakan salah satu program pemerintah yang diinisiasi dengan tujuan memperkuat komponen pendidikan masyarakat Kota Pariaman. Sekaligus sebagai program unggulan kota Pariaman yang dinahkodai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Bentuk program ini adalah berupa pemberian beasiswa kepada keluarga kurang mampu untuk melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi berbasis keahlian (Vokasi), dengan manfaat berupa biaya kuliah sekaligus biaya hidup selama masa studi.

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwako) nomor 35 tahun 2019, program ini bertujuan pertama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Pariaman, dan kedua sebagai salah satu cara untuk memberantas kemiskinan di Kota Pariaman. Dengan visi mulia ini tentu ketercapaian dan keberhasilan program dalam tahap implementasi harus dipastikan berjalan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu kita melihat level implementasi ini pada empat variable penting, yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi.

4.1 Komunikasi

Dalam mengkomunikasikan program ini pemerintah kota pariaman melalui dinas Pendidikan sudah melakukan tahapan sosialisasi langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan juga menggunakan media. Strategi komunikasi sudah dirancang dengan alur dan pertimbangan yang matang, mulai dari tahapan:

- a. Audiensi dan kebutuhan informasi. data awal didapati dengan melakukan profiling masyarakat kota, termasuk kependudukan, kerumahtanggaan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Data dikumpulkan secara menyeluruh mengenai tingkat pendidikan, jumlah usia produktif, dan tingkat ekonomi masyarakat. Data diperoleh dari observasi data penduduk miskin oleh petugas kelurahan dan desa. Untuk

memastikan keakuratan data, Dinas Pendidikan melakukan observasi langsung kelapangan dan mendengarkan langsung permasalahan yang terjadi pada masyarakat melalui dialog dan wawancara.

- b. Penetapan sasaran komunikasi, berdasarkan hasil wawancara, ditemukan data bahwa dinas membatasi sasaran yang dapat mengikuti program, mulai dari tahap seleksi, hingga penetapan penerima bantuan, hal ini penting untuk mendapatkan input terbaik (Syarif et al., 2021).

Dalam tahap sosialisasi ini juga digunakan radio damai FM dan Radio Dara FM, dengan kurun waktu mulai dari januari sampai April setiap tahunnya, karena pada waktu ini siswa sedang mempersiapkan diri untuk mencari kampus terbaik mereka. Selain itu penggunaan news media seperti website pemerintah, koran lokal, dan portal berita online, serta media sosial milik pemerintah juga ikut berkontribusi menyampaikan informasi program ini dengan harapan bisa mencapai seluruh lapisan masyarakat yang berhak menerima manfaat dan memenuhi syarat untuk mengikuti program.

Dampak dari metode sosialisasi yang sudah dijalankan sebenarnya cukup nyata berdasarkan data aplikasi yang masuk dan lolos seleksi administrasi, dimulai tahun 2018 pemerintah yang belum maksimal dalam sosialisasi hanya bisa memberi beasiswa mahasiswa yang sudah terdata lulus di perguruan tinggi nasional (PTN) sebanyak 10 orang untuk kemudian diajukan namanya ke Baznas Kota Pariaman sebagai penerima manfaat. kemudian pada tahun 2019 sebanyak 115 orang lulus seleksi, dan lolos PTN sebanyak 36 orang. Kemudian pada tahun 2020, bertambah lagi menjadi 266 orang lulus seleksi dan 66 orang lulus PTN. Pada tahun 2021 sebanyak 75 orang lulus PTN.

Memang ditemukan beberapa kendala dalam komunikasi program, diantaranya

kemampuan komunikasi efektif yang masih lemah dari staf penanggungjawab program, begitu juga keterbatasan anggaran kegiatan yang dinilai cukup menghambat kelancaran proses komunikasi. Berikutnya peran aparatur desa sebagai pihak implementor yang paling dekat dengan penerima manfaat dinilai kurang aktif menyebarkan informasi program ini.

Dari eksternal kendala yang dihadapi adalah beragamnya pemahaman masyarakat terkait program, sebagian karena faktor bahasa, tingkat pendidikan, kondisi lingkungan, serta sikap masyarakat pada saat terjadinya komunikasi. Namun hambatan ini semestinya tidak menjadi penghalang karena asas kemanfaat program diakui oleh seluruh masyarakat, meski dengan harapan kapasitas bantuan yang lebih besar lagi.

Berdasarkan data diatas maka, proses transmisi berjalan baik, serta cukup jelas dan bisa dipahami masyarakat, dengan konsistensi perintah yang jelas pada setiap lapisan implementor.

4.2 Sumber Daya

Ketersediaan staf dalam implementasi program ini, memang dinilai masih kurang, disertai kewenangan yang belum jelas pada setiap pos tanggung jawabnya karena adanya perubahan tugas dan wewenang dalam OPD yang merupakan dampak masih penyesuaian dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah berdasarkan Kode Rekening per urusan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, ditambah kemampuan komunikasi efektif yang juga belum maksimal. Adapun ketersediaan informasi yang memadai terkait program dianggap cukup memadai, karena tersosialisasi dengan baik dan program sosialisasi juga terdokumentasi dengan baik. Hal ini karena ketersediaan petunjuk teknis yang jelas mengenai keseluruhan program.

Fasilitas untuk kelancaran program dianggap cukup memadai. Diantara bentuk sumber daya paling penting ini adalah sumber biaya yang berasal dari APBD Kota

Pariaman, Baznas Kota Pariaman, dan bantuan donatur masyarakat seperti Corporate sosial Responsibilities (CSR). Fasilitas ini sangat nyata bentuknya berupa bantuan Beasiswa uang Pendidikan (seperti UKT, Uang Pembangunan dll) dan uang saku (Rp.500.000,-/ bulan untuk mahasiswa di dalam provinsi Sumbar dan Rp2.500.000,-/ bulan untuk mahasiswa di luar provinsi Sumbar).

Adapun fasilitas Pendidikan yang disediakan adalah berupa kampus-kampus vokasi dengan kualitas terbaik, baik dalam Provinsi Sumbar maupun di luar Sumbar, dengan rincian sebagai berikut : Politeknik Negeri Padang, *Batam Tourism Polytechnic*, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Politeknik ATI Padang, Politeknik Pelayaran Sumbar, Universitas Negeri Padang, Universitas Dharma Andalas, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sumatera Barat, Universitas Indonesia, *Telkom University*.

Selain sebagai penerima manfaat langsung dari program, hakikatnya mahasiswa ini juga merupakan sumber daya utama dari keberhasilan pencapaian tujuan program ini, yaitu meningkatkan kualitas Pendidikan dan menurunkan angka kemiskinan. Mahasiswa dalam menerima bantuan sudah diberikan wawasan dan pengetahuan tentang niat, nilai dan pemanfaatan dana beasiswa secara islami, menurut Edwin (Hidayat & Cahyono, 2020), penerima bantuan beasiswa harus memahami adab pemanfaatan dana beasiswa secara islami, dengan menjaga betul bahwa dana digunakan sesuai koridor batasan yang telah ditetapkan dalam akad beasiswa, juga pembiasaan infak oleh penerima serta menabung jika memungkinkan.

4.3 Disposisi dan Attitude

Dalam beberapa kasus kebijakan pemerintah dalam ranah public mengalami kondisi yang disebut zona ketidakacuhan, karena terjadi ketidak sepehaman antara pembuat kebijakan dan pelaksana di

lapangan, baik karena perbedaan kepentingan kelompok dan individu maupun karena miskomunikasi yang melahirkan ketidakpedulian di atas konflik komunikasi.

Sebelum kebijakan diturunkan maka diharapkan disposisi dari pemerintah tersebut tidak bertentangan secara jelas dengan harapan implementor, dalam kasus program sagesaja tidak ditemukan kondisi ketidak acuhan ini, karena kejelasan program yang nyata manfaatnya bagi masyarakat kurang mampu.

Sikap mendukung juga digambarkan oleh berbagai bentuk dukungan oleh beberapa OPD seperti Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang berperan dalam perencanaan dan penganggaran. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman letak rekening anggaran. Dinas Sosial berperan sebagai sumber data penduduk miskin di Kota Pariaman. Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berperan menginformasikan ke masyarakat Kota Pariaman, tidak lupa dukungan dari pengelola SMA, SMK dan MA di Kota Pariaman yang berperan menginformasikan ke siswa kelas XII yang berasal dari Kota Pariaman.

4.4 Struktur Birokrasi

Birokrasi yang efektif saat ini memang masing menjadi harapan besar masyarakat, dengan beragam kebijakan pemerintah yang berupaya memangkas proses birokrasi berbelit masih saja menemui kendala. Beberapa mahasiswa masih menemukan keterlambatan dalam pencairan dana beasiswa. Keterlambatan ini menurut sebagian mereka disebabkan oleh struktur birokrasi yang berlapis dan berbelit (Roziqin & Yusuf, 2020).

Menurut (Dwiyanto, 2011) Karakter birokrasi di Indonesia masih cenderung menerapkan konsep weber, birokrasi indonesiapun disebut sebagian pengamat dengan system weberian. System ini

memungkinkan terjadinya banyak pelanggaran dan kelemahan dari sisi pelayanan karena ketidakmampuan beradaptasi pada lingkungan masyarakat dan tidak menganut nilai-nilai mulia, sehingga yang lahir justru patologi birokrasi.

Efektifitas struktur birokrasi menjadi tolak ukur penting dan menjadi sasaran utama evaluasi suatu kebijakan sebagaimana dikutip dari (Subarsono, 2021). Upaya pemangkasan birokrasi telah dilakukan di Kota Pariaman pada tanggal 30 Mei 2022 sebanyak 166 orang pejabat struktural, dan termasuk juga OPD yang menangani Saga Saja, dengan harapan pelayanan publik bisa lebih ringkas maka eselon III sampai IV. Termasuk yang sudah dirasakan adalah pada bagian keorganisasian dan kepegawaian. Pengalihan pegawai sesuai kompetensi sudah dilakukan namun pelatihan dan diklat yang dibutuhkan belum mencukupi (Rohman & Risma, 2021).

Keberlanjutan program sagesaja sangat ditentukan oleh beragam aspek yang sudah dipaparkan dalam teori penelitian ini mencakup komunikasi, Sumber daya, Kecendrungan tingkah laku dan sikap, dan struktur birokrasi. Hasil analisis penulis dalam skop komunikasi tidak ditemukan kendala yang berarti, karena tersedia beragam media dalam mensosialisasikan dan mengkomunikasikan program sagesaja. Dalam skop sumber daya, dibutuhkan usaha lebih dari pemerintah untuk mencari dari beragam sumber lain di luar APBD, untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat program. Dalam skop tingkah laku dan sikap, dibutuhkan system control dari pemerintah bagi penerima manfaat selama menggunakan bantuan dari program, dengan tujuan efektifitas pencapaian target belajar mahasiswa sesuai vokasi dan kompetensi yang dialami. Dalam skop birokrasi tidak ditemukan kendala yang dapat mengganggu keberlangsungan program Saga Saja.

5. Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Pemerintah Kota Pariaman secara umum telah berjalan dengan baik dalam indikator Komunikasi, Disposisi dan Attitude, serta Struktur Birokrasi. Hanya saja masih ditemukan beberapa kelemahan pada Sumber Daya, dimana ketersediaan staf dalam implementasi dinilai kurang, serta kewenangan yang belum jelas pada setiap pos tanggung jawabnya

Kebermanfaatan program ini jelas sangat dirasakan masyarakat dan berdampak jelas dalam penanganan angka putus kuliah masyarakat kota pariaman. Permasalahan putus Pendidikan di usia kuliah ini secara bertahap dapat dikurangi melalui program saga saja ini, apalagi bila kuota bantuan ditingkatkan jumlahnya setiap tahun, maka akan lebih besar lagi nilai kebermanfaatannya.

5.1 Saran

Pemerintah Kota Pariaman disarankan untuk melakukan revisi Perwako yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Saga Saja sehingga menyesuaikan dengan urusan yang telah diatur dalam Permendagri 90 tahun 2019, sehingga dapat mengatasi kelemahan indikator Sumber Daya dalam Implementasi kebijakan Saga Saja.

Daftar Pustaka

- Adniyah, A., Agrosamdhya, R., & Iswahyuni, I. (2021). Efektivitas Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) BAZNAS Provinsi Bali dalam Meningkatkan Prestasi Akademik di STAI Denpasar Bali. *Widya Balina*.
<https://doi.org/10.53958/wb.v6i2.115>
- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). In *Alfa Beta*.
- Almashuri, I., & Subandi, B. (2021). Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur. *Journal of Islamic Management*.
<https://doi.org/10.15642/jim.v1i1.387>
- Dunn, W. N. (1998). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Cetakan Kedua. In *Gadjah Mada University Press*.
- Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi | Perpustakaan Kementerian PANRB. *PT. Gramedia Pustaka Utama*.
- Hidayat, E. B., & Cahyono, E. F. (2020). PENERAPAN PERILAKU KONSUMSI ISLAM PADA PENERIMA BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI JAWA TIMUR (PERSPEKTIF FAHIM KHAN). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*.
<https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1462-1475>
- Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*.
<https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i3.14342>
- Nugroho, R. (2017). Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik. *Jakarta: Elex Media Komputindo*.
- Rohman, M. N., & Rismana, D. (2021). Kebijakan Pemangkas Struktur Birokrasi di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*.
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5232>
- Roziqin, A., & Yusuf, I. M. (2020). Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi Kasus di Universitas Diponegoro (2018). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*.
<https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.110-122.2019>
- Subarsono, A. G. (2021). Bab 4 Pelayanan Publik Yang Efisien, Responsif, Dan Non-Partisan. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.

- Suryaningsih Aseh, T. F. G. dan Z. Z. (2021). Problematika Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2020. *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, Vol. 2 No.(30-09–2021), 31.
- Syarif, N., Roem, E. R., & Arif, E. (2021). Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Pariaman Pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana. *Jurnal Komunikasi Global*.
<https://doi.org/10.24815/jkg.v10i1.20523>
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). *Handbook of Public Policy*.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*.
<https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>